BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 International Financial Reporting Standar (IFRS)

Internasional financial reporting standar (IFRS) merupakan standar akuntansi internasinal yang diterbitkan oleh *Internatioan acounting Standar Board* (IASB). IFRS (Internasional Financial Accounting Standard) adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keungan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yaitu : Menghasilkan transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang Periode yang disajikan. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS.Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna. Saat ini standar akuntansi keuangan nasional sedang dalam proses konvergensi secara penuh dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang dikeluarkan oleh IASB (International Accounting Standards Board. Oleh karena itu, arah penyusunan dan pengembangan standar akuntansi keuangan ke depan akan selalu mengacu pada standar akuntansi internasional (IFRS) tersebut.

Beberapa penelitian di luar negeri telah dilakukan untuk menganalisa dan membuktikan efek penerapan IAS (IFRS) dalam laporan keuangan perusahaan domestik. Hung & Subramanyan (2004) menguji efek adopsi SAI terhadap laporan keuangan perusahaan di Jerman. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa total aktiva, total kewajiban dan nilai buku ekuitas, lebih tinggi yang menerapkan IAS disbanding standar akuntansi Jerman, dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada pendapatan dan laba bersih yang didasarkan atas Standar Akuntansi Internasional dan Standar Akuntansi Jerman (federick D.S.Choy, 2010).

Adopsi SAK juga berdampak pada rasio keuangan, antaralain rasio ROE, RAO, ATO, rasio LEV dan PM, rasio nilai buku terhadap nilai pasar ekuitas, rasio Earning to Price. Keuntungan harmonisasi menurut Lecturer Ph. Diaconu Paul (2002) adalah:

1. Informasi keuangan yang dapat diperbandingkan,
2. Harmonisasi dapat menghemat waktu dan uang,
3. Mempermudah transfer informasi kepada karyawan serta mempermudah dalam melakukan training pada karyawan,
4. Meningkatkan perkembangan pasar modal domestik menuju pasar modal internasional,
5. Mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan operasional yang berguna untuk menjalankan bisnis serta mempermudah dalam pengelolaan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, dan pihak lain.

Hal inilah yang mendorong atau menuntut perubahan peraturan akuntansi domestik ke arah IFRS. Dengan mengadopsi IFRS berarti laporan keuangan berbicara dengan bahasa akuntansi yang sama, hal ini akan memudahkan perusahaan multinasional dalam berkomunikasi dengan cabang-cabang perusahaannya yang berada dalam negara yang berbeda, meningkatkan kualitas pelaporan manajemen dan pengambilan keputusan(Cahyonowati & Ratmono, 2011).

Standar akuntansi internasional ini disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu badan standar akuntansi internasional (IASB), komisi masyarak eropa (EC), organisasi internasional pasar modal (IOSOC), dan federasi akuntansi internasional (IFAC). Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal (International of Securities Commissions-IOSCO) beranggotakan sejumlah badan regulator pasar modal yang ada di lebih 100 negara. IOSCO telah bekerja secara ekstensif dalam pengungkapan internasional dan standar akuntansi memfasilitasi kemampuan perusahaan memperoleh modal secara efisien melalui pasar global surat berharga. Pada tahun 1998 IOSCO menerbitkan satu set standar pengungkapan non keuangan yang pada akhirnya memungkinkan perusahaan untuk menggunakan satu prospektus yang sama untuk menawarkan atau mencatatkan saham pada salah satu pasar modal utama di dunia. Sebuah komite teknis IOSCO memusatkan perhatian pada pengungkapan dan akuntansi multinasional. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi proses yang dapat digunakan para penerbit saham kelas dunia untuk memperoleh modal dengan

cara yang paling efektif dan efisien pada seluruh pasar modal yang terdapat permintaan investor. Komite ini berkerja sama dengan IASB, antara lain dengan memberikan masukan terhadap proyek-proyek IASB. Suatu studi kelompok kerja yang diselesaikan pada tahun 1998 memberikan rekomendasi yang memfasilitasi penawaran ekuitas multinasional. Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional (AISC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan. Natawidnyana (2008), menyatakan bahwa Sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting Standards (IAS). IAS diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh *International Accounting Standards Committee (IASC*). International Accounting Standards Committe (IASC) merupakan badan swasta independen yang dibentuk tahun 1973 yang bertujuan untuk mencapai keseragaman dalam penggunaan prinsip akuntansi yang dapat digunakan untuk pelaporan keuangan seluruh dunia. Anggota asli dari IASC adalah badan akuntansi dari 9 negara : Australia, Kanada, Perancis, Jepang, Mexico, Belanda, The United Kingdom, the United States, dan Jerman Barat. Sejak tahun 1983, IASC telah memasukan seluruh badan akuntansi profesional yang menjadi anggota dari *International Federation of Accountants.* Sebagian besar oraganisasi-organisasi ini merupakan asosiasi akuntan publik yang berlisensi, akibatnya, keanggotaan IASC

terdiri dari berbagai organisasi yang lebih terbatas dibandingkan dengan apa yang dilakukan FASB. Tahun 2001 IASC digantikan dengan IASB.

IASB segera memilih untuk mempertahankan semua pernyataan dan posisi IASC kecuali jika memang perlu untuk diganti. Kerangka Dasar IASB Disetujui oleh IASC pada April 1989 untuk dipublikasikan pada Juli 1989 dan kemudian diadopsi pada April 2001. Kerangka dasar ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuanga untuk pengguna eksternal.Kerangka dasar ini membahas:

(a) Tujuan laporan keuangan
(b) karakteristik kualitatif yang menetukan manfaat informasi dalam dalam laporan keuangan;
(c) definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur yang membentuk laporan keuangan; dan
(d) konsep modal dan pemeliharaan modal.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan dalam posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat untuk sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama (umum) sebagian besar pengguna. Namun laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna untuk pengambilan keputusan

ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Pada bulan April 2001, IASB mengadospsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan Struktur IFRS.

International Financial Reporting Standards mencakup:

• *International Financial Reporting Standards* (IFRS) – standar yang diterbitkan setelah tahun 2001

• *International Accounting Standards* (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001

• *Interpretations* yang diterbitkan oleh International *Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC) – setelah tahun 2001

• Interpretations yang diterbitkan oleh *Standing Interpretations Committee* (SIC) – sebelum tahun 2001.

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi yaitu :

1. berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya.

2. pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca).
3. yang dimuat dalam standar adalah pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan.
4. digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam badan laporan (Neraca, Laporan Laba/Rugi) atau berupa penjelasan (notes) yang menyertai laporan keuangan (Chairi, 2009).

Konvergensi ke IFRS di Indonesia Indonesia saat ini belum mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan IFRS melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan lokal. Dewan Pengurus Nasional IAI bersama-sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan Dewan SAK merencanakan tahun 2012 akan menerapkan standar akuntansi yang mendekati konvergensi penuh kepada IFRS. Dari data-data di atas kebutuhan Indonesia untuk turut serta melakukan program konvergensi tampaknya sudah menjadi keharusan jika kita tidak ingin tertinggal. Sehingga, dalam perkembangan penyusunan standar akuntansi di Indonesia oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tidak dapat terlepas dari perkembangan penyusunan standar akuntansi internasional yang dilakukan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB). Standar akuntansi keuangan nasional saat ini

sedang dalam proses secara bertahap menuju konverjensi secara penuh dengan International Financial Reporting Standards yang dikeluarkan oleh IASB. Adapun posisi IFRS/IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini dan akan diadopsi pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti yang tercantum dalam daftar- daftar berikut ini.

IFRS/IAS yang Telah Diadopsi ke dalam PSAK hingga 31 Desember 2008 adalah

1. IAS 2 *Inventories*

2. IAS 10 *Events after balance sheet date*

3. IAS 11 *Construction contracts*

4. IAS 16 *Property, plant and equipment*

5. IAS 17 *Leases*

6. IAS 18 *Revenues*

7. IAS 19 *Employee benefits*

8. IAS 23 *Borrowing costs*

9. IAS 32 *Financial instruments: presentation*

10. IAS 39 *Financial instruments: recognition and measurement*

IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2010 adalah :

1. *IAS 7 Cash flow statements*
2. *IAS 20 Accounting for government grants and disclosure of government assistance*
3. *IAS 24 Related party disclosures*
4. *IAS 29 Financial reporting in hyperinflationary economies*
5. *IAS 33 Earning per share*
6. *IAS 34 Interim financial reporting*
7. *IAS 41 Agriculture*

Dan untuk hal-hal yang tidak diatur standar akuntansi internasional, DSAK akan terus mengembangkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan nyata di Indonesia, terutama standar akuntansi keuangan untuk transaksi syariah, dengan semakin berkembangnya usaha berbasis syariah di tanah air. Landasan konseptual untuk akuntansi transaksi syariah telah disusun oleh DSAK dalam bentuk Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal ini diperlukan karena transaksi syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi usaha umumnya sehingga ada beberapa prinsip akuntansi umum yang tidak dapat diterapkan dan diperlukan suatu penambahan prinsip akuntansi yang dapat dijadikan landasan konseptual. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk transaksi syariah akan dimulai dari nomor 101 sampai dengan 200. Indonesia harus mengadopsi standar akuntansi internasional (International Accounting Standard/IAS) Untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau

sebaliknya. Namun demikian, untuk mengadopsi standar internasional itu bukan perkara mudah karena memerlukan pemahaman dan biaya sosialisasi yang mahal. Membahas tentang IAS saat ini lembaga-lembaga yang aktif dalam usaha harmonisasi standar akuntansi ini antara lain adalah IASC (International Accounting Standard Committee), Perserikatan Bangsa-Bangsa dan OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Beberapa pihak yang diuntungkan dengan adanya harmonisasi ini adalah perusahaan-perusahaan multinasional, kantor akuntan internasional, organisasi perdagangan, serta IOSCO (International Organization of Securities Commissions). Suatu perusahaan mulai terlibat dengan akuntansi internasional adalah pada saat mendapatkan kesempatan melakukan transaksi ekspor atau impor. Standard akuntansi internasional (IAS) adalah standard yang dapat digunakan perusahaan multinasional yang dapat menjembatani perbedaan-perbedaan antar Negara, dalam perdagangan multinasional. IASC didirikan pada tahun 1973 dan beranggotakan anggota organisasi profesi akuntan dari sepuluh negara.

Di tahun 1999, keanggotaan IASC terdiri dari 134 organisasi profesi akuntan dari 104 negara, termasuk Indonesia. Tujuan IASC adalah

1. merumuskan dan menerbitkan standar akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan dan mempromosikannya untuk bisa diterima secara luas di seluruh dunia, serta
2. bekerja untuk pengembangan dan harmonisasi standar dan prosedur akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan. IASC memiliki kelompok

konsultatif yang disebut IASC Consultative Group yang terdiri dari pihak-pihak yang mewakili para pengguna laporan keuangan, pembuat laporan keuangan, lembaga-lembaga pembuat standar, dan pengamat dari organisasi antar-pemerintah. Kelompok ini bertemu secara teratur untuk membicarakan kebijakan, prinsip dan hal-hal yang berkaitan dengan peranan IASC. IFRS (Internasional Financial Accounting Standard) adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keungan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan.

Tujuan IFRS adalah :memastikan bahwa laporan keungan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang :

1. transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang peiode yang disajikan
2. menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS
3. dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna

Manfaat dari adanya suatu standard global:

1. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Stadart pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal

2. Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik
3. Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi
4. Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standard dapat disebarkan dalam mengembangkan standard global yang berkualitas tertinggi.

Hamonisasi telah berjalan cepat dan efektif, terlihat bahwa sejumlah besar perusahaan secara sukarela mengadopsi standard pelaporan keuangan Internasional (IFRS). Banyak Negara yang telah mengadopsi IFRS secara keseluruhan dan menggunakan IFRS sebagai dasar standard nasional. Hal ini dilakukan untuk menjawab permintaan investor institusional dan pengguna laporan keuangan lainnya. Usaha-usaha standard internasional ini dilakukan secara sukarela, saat standard internasional tidak berbeda dengan standard nasional, maka tidak akan ada masalah, yang menjadi masalah, apabila standard internasional berbeda dengan standard nasional. Bila hal ini terjadi, maka yang didahulukan adalah standard nasional (rujukan pertama). Banyak pro dan kontra dalam penerapan standard internasional, namun seiring waktu, Standard internasional telah bergerak maju, dan menekan Negara-negara yang kontra.

2.1.2 Perkembangan Konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) di Indonesia

Perkembangan Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) di Indonesia International Financial Reporting Standards (IFRS) menjadi

trend topic yang hangat bagi akuntan dan top manajemen pada perusahaan-perusahaan yang sudah terjun di Bursa Efek global dan juga para akademisi serta para Auditor yang akan melakukan pemeriksaan pada perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan IFRS tersebut. Maka pada tanggal 17-22 Januari 2011 telah diadakan Pelatihan Internasional "TOT" untuk IFRS dan Penyusunan Kamus Akuntansi Indonesia yang diselenggarakan oleh Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM(Suprihatin & Tresnaningsih, 2013).

Pada pelatihan tersebut ada banyak hal menarik yang disampaikan oleh para pembicara dari anggota DSAK IAI dan akademisi UGM yaitu Dr. Setiyono, Kantor Akuntan Publik PWC Djohan Pinnarwan, SE., BAP, dari Akademisi UGM yaitu Prof. Dr. Slamet Sugiri, MBA dan Prof. Dr. Suwardjono, M Sc. Pada Pelatihan tersebut secara umum peserta yang berpartisipasi sebagian besar adalah para akademisi dan staf akuntansi dan Auditor. Sebelum membahas lebih detail tentang perkembangan di Indonesia, tentu kita akan bertanya kenapa di Indonesia harus melakukan konvergensi IFRS? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu tidak lepas dengan kepentingan global yaitu agar dapat meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia disamping itu Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum, Hasil dari pertemuan pemimpin negara G20 forum di Washington DC, 15 November 2008 secara prinsip-prinsip G20 yang dicanangkan sebagai berikut: 1. Strengthening Transparency and Accountability 2. Enhancing Sound Regulation 3.

Promoting integrity in Financial Markets 4. Reinforcing International Cooperation 5. Reforming International Financial Institutions 1. Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia.

Pada periode 1973-1984, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah membentuk Komite Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia untuk menetapkan standar-standar akuntansi, yang kemudian dikenal dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)(Saraswati, 2012). Pada periode 1984-1994, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 (PAI 1984). Menjelang akhir 1994, Komite standar akuntansi memulai suatu revisi besar atas prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dengan mengumumkan pernyataan-pernyataan standar akuntansi tambahan dan menerbitkan interpretasi atas standar tersebut. Revisi tersebut menghasilkan 35 pernyataan standar akuntansi keuangan, yang sebagian besar harmonis dengan IAS yang dikeluarkan oleh IASB. Pada periode 1994-2004, ada perubahan Kiblat dari US GAAP ke IFRS, hal ini ditunjukkan. Sejak tahun 1994, telah menjadi kebijakan dari Komite Standar Akuntansi Keuangan untuk menggunakan International Accounting Standards sebagai dasar untuk membangun standar akuntansi keuangan Indonesia. Dan pada tahun 1995, IAI melakukan revisi besar untuk menerapkan standar-standar akuntansi baru, yang kebanyakan konsisten dengan IAS.

Beberapa standar diadopsi dari US GAAP dan lainnya dibuat sendiri. Pada periode 2006-2008, merupakan konvergensi IFRS Tahap 1, Sejak tahun 1995 sampai

tahun 2010, buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru. Proses revisi dilakukan sebanyak enam kali yakni pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 Juni 2006, 1 September 2007, dan versi 1 Juli 2009. Pada tahun 2006 dalam kongres IAI X di Jakarta ditetapkan bahwa konvergensi penuh IFRS akan diselesaikan pada tahun 2008. **PSAK adalah** singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan suatu kerangka dari prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berjalan dan telah disepakati serta telah disahkan oleh institut atau lembaga resmi di indonesia.

Dari *Pengertian PSAK* di atas kita dapat mengambil gambaran bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi tentang tata cara penyusunan laporan keuangan yang selalu mengacu pada teori yang ada seperti layaknya IFRS yang di gunakan pada skala global. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum atau disebut general purpose financial statements agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan sebelumnya maupun dengan laporan keuangan lain. PSAK mengatur persyaratan struktur laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan juga diperlukan untuk memudahkan auditor serta penyusunan laporan keuangan, juga

memudahkan pembaca laporan keuangan. Sejak Tahun 2012, PSAK yang diterapkan di Indonesia telah berdasarkan IFRS. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK-IFRS, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. PSAK Syariah ditetapkan oleh Dewan Akuntansi Syariah sedangkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Alasan indonesia menerapkan PSAK berdasarkan IFRS karena Indonesia adalah bagian dari International Federation of Accountants (IFAC) yang merupakan ikatan akuntan internasional (jika di indonesia IAI) yang sudah pasti harus mematuhi Statement Membership Obligation (SMO), karena inilah indonesia harus menjadikan IFRS sebagai Standar akuntansi yang sebelumnya adalah PSAK.

Target ketika itu adalah taat penuh dengan semua standar IFRS pada tahun 2008. Namun dalam perjalanannya ternyata tidak mudah. Sampai akhir tahun 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru mencapai 10 standar IFRS dari total 33 standar. PSAK disahkan 23 Desember 2009:

1. PSAK 1 (revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK 2 (revisi 2009) : Laporan arus kas
3. PSAK 3 (revisi 2009): Laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri.
4. PSAK 4 (revisi 2009) : Segmen operasi
5. PSAK 12 (revisi 2009) : Bagian parsitipasi dalam pentura bersama
6. PSAK 15 (revisi 2009) : Investasi pada entitas asosiasi

7. PSAK 25 (revisi 2009) : Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan
8. PSAK 48 (revisi 2009) : Penurunan nilai asset
9. PSAK 57 (revisi 2009) : Provisi, liabilitas kontinjensi, dan asset kontinjensi
10. PSAK 58 (revisi 2009) : Aset tidak lancer yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan interpretasi disahkan 23 Desember 2009 :

1. ISAK 7 (revisi 2009) : Konsolidasi entitas bertujuan khusus
2. ISAK 9 : Perubahan atas liabilitas purna operasi, liabilitas purna operasi
3. ISAK 10 : Program loyalitas pelanggan
4. ISAK 11 : Distribusi asset nonkas kepada pemilik
5. ISAK 12 : Pengendalian bersama entitas : konstribusi non moneter oleh venturer PSAK disahkan sepanjang 2009 yang berlaku efektif tahun 2010 :

1. PPSAK 1 : Pencabutan PSAK 32 : Akuntansi kehutanan, PSAK 35 : Akuntansi pendapatan jasa telekuminaksi, dan PSAK 37 : Akuntansi Penyelenggaraan Jalan tol
2. PPSAK 2 : Pencabutan PSAK 41 : Akuntansi waran dan PSAK 43 : Akuntansi Piutang
3. PPSAK 3 : Pencabutan PSAK 54 : Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah
4. PPSAK 4 : Pencabutan PSAK 32 (revisi 2009) : Akuntansi perbankan, PSAK 42 : Akuntansi perusahaan efek, PSAK 49 : Akuntansi reksa dana

5. PPSAK % : Pencabutan ISAK 06 : Interpretasi atas paragraf 12 dan 16 PSAK No.55 (1999) tentang instrument derivatif melekat pada kontrak dalam mata uang asing PSAK yang disahkan 19 februari 2010 :

1. PSAK 19 (2010): Aset tidak berwujud
2. PSAK 14 (2010): Biaya Situs Web
3. PSAK 23 (2010): Pendapatan
4. PSAK 7 (2010): Pengungkapan Pihak-Pihak Yang Berelasi
5. PSAK 22 (2010): Kombinasi Bisnis (disahkan 3 Maret 2010)
6. PSAK 10 (2010): Transaksi Mata Uang Asing (disahkan 23 Maret 2010
7. ISAK 13 (2010) : Lindung nilai investasi netto dalam kegiatan usaha luar negeri exposure draf publick hearing 27 April 2010 :

1. ED PSAK 24 (2010): Imbalan Kerja 2. ED PSAK 18 (2010): Program Manfaat Purnakarya
2. ED ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa (IFRIC 12)
3. ED ISAK 15: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
4. ED PSAK 3: Laporan Keuangan Interim
5. ED ISAK 17: Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai Exposure Draft PSAK Public Hearing 14 Juli 2010 :

1. ED PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
2. ED PSAK 50 (R 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian
3. ED PSAK 8 (R 2010): Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

4. ED PSAK 53 (R 2010): Pembayaran Berbasis Saham Exposure Draft PSAK Public Hearing 30 Agustus 2010 :

1. ED PSAK 46 (Revisi 2010) Pajak Pendapatan
2. ED PSAK 61: Akuntansi Hibah Pemerintah Dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
3. ED PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
4. ED ISAK 18: Bantuan Pemerintah-Tidak Ada Relasi Specifik dengan Aktivitas Operasi
5. ED ISAK 20: Pajak Penghasilan-Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya Kendala dalam harmonisasi PSAK ke dalam IFRS

1. Dewan Standar Akuntansi yang kekurangan sumber daya
2. IFRS berganti terlalu cepat sehingga ketika proses adopsi suatu standar IFRS masih dilakukan, pihak IASB sudah dalam proses mengganti IFRS tersebut.
3. Kendala bahasa, karena setiap standar IFRS harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan acapkali ini tidaklah mudah.
4. Kendala bahasa, karena setiap standar IFRS harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan acapkali ini tidaklah mudah.
5. Kesiapan perguruan tinggi dan akuntan pendidik untuk berganti kiblat ke IFRS
6. Support pemerintah terhadap issue konvergensi

Efektif 1 januari 2017 IAI mengeluarkan standar akuntansi keuangan convergensi IFRS memiliki 79 standar yaitu(Indonesia, 2017) :

Tabel 2. 1 PSAK Januari 2017

	Standar Akuntansi Keuangan	**Tanggal Pengesahan**
1	PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan	28 Oktober 2015
2	PSAK 2 Laporan Arus Kas	27 Agustus 2014
3	PSAK 3 Laporan Keuangan Interim	28 September 2016
4	PSAK 4 Laporan Keuangan Tersendiri	18 November 2015
5	PSAK 5 Segmen Operasi	18 November 2015
6	PSAK 7 Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi	18 November 2015
7	PSAK 8 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan	27 Agustus 2014
8	PSAK 10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing	27 Agustus 2014
9	PSAK 13 Properti Investasi	18 November 2015
10	PSAK 14 Persediaan	27 Agustus 2014
11	PSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi dan	18 November 2015

	Ventura Bersama	
12	PSAK 16 Aset Tetap	18 November 2015
13	PSAK 18 Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya	27 Agustus 2014
14	PSAK 19 Aset Takberwujud	18 November 2015
15	PSAK 22 Kombinasi Bisnis	18 November 2015
16	PSAK 23 Pendapatan	27 Agustus 2014
17	PSAK 24 Imbalan Kerja	28 September 2016
18	PSAK 25 Kebijakan Akuntansi,Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan	18 November 2015
19	PSAK 26 Biaya Pinjaman	27 Agustus 2014
20	PSAK 28 Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian	11 Desember 2012
21	PSAK 30 Sewa	27 Agustus 2014
22	PSAK 34 Kontrak Konstruksi	27 Agustus 2014
23	PSAK 36 A kuntansi Kontrak Asuransi Jiwa	11 Desember 2012
24	PSAK 38 Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	11 September 2012

25	PSAK 44 Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat	23 Desember 1997
26	PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba	8 April 2011
27	PSAK 46 Pajak Penghasilan	27 Agustus 2014
28	PSAK 48 Penurunan Nilai Aset	29 April 2014
29	PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian	29 April 2014
30	PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham	18 November 2015
31	PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran	29 April 2014
32	PSAK 56 Laba Per Saham	27 Agustus 2014
33	PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi	18 November 2015
34	PSAK 58 Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan	28 September 2016
35	PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan	28 September 2016
36	PSAK 61 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah	27 Agustus 2014
37	PSAK 62 Kontrak Asuransi	27 Agustus 2014

38	PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi	27 Agustus 2014
39	PSAK 64 Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi Pada Pertambangan Sumber Daya Mineral	27 Agustus 2014
40	PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian	18 November 2015
41	PSAK 66 Pengaturan Bersama	18 November 2015
42	PSAK 67 Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain	18 November 2015
43	PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar	18 November 2015
44	PSAK 70 Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak	14 September 2016
45	ISAK 8 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa	27 Agustus 2014
46	ISAK 9 Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa	27 Agustus 2014
47	ISAK 10 Program Loyalitas Pelanggan	27 Agustus 2014
48	ISAK 11 Distrubusi Aset Nonkas kepada Pemilik	27 Agustus 2014
49	ISAK 13 Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri	27 Agustus 2014

50	ISAK 14 Aset Tak berwujud – Biaya Situs Web	27 Agustus 2014
51	ISAK 15 PSAK 24 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum, dan Interaksinya	1 Oktober 2014
52	ISAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa	27 Agustus 2014
53	ISAK 17 Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai	27 Agustus 2014
54	ISAK 18 Bantuan Pemerintah –Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi	27 Agustus 2014
55	ISAK 19 Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi	27 Agustus 2014
56	ISAK 20 Pajak penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya	27 Agustus 2014
57	ISAK 21 Perjanjian Konstruksi Real Estat	18 Mei 2011
58	ISAK 22 Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan	27 Agustus 2014
59	ISAK 23 Sewa Operasi –Insentif	27 Agustus 2014
60	ISAK 24 Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa	27 Agustus 2014
61	ISAK 25 Hak atas Tanah	29 November 2011

62	ISAK 26 Penilaian Kembali Derivatif Melekat	27 Agustus 2014
63	ISAK 27 Pengalihan Aset dari Pelanggan	27 Agustus 2014
64	ISAK 28 Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas	27 Agustus 2014
65	ISAK 29 Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka	27 Agustus 2014
66	ISAK 30 Pungutan	28 Oktober 2015
67	ISAK 31 Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi	18 November 2015
68	PPSAK 1 Pencabutan PSAK 32: Akuntansi Kehutanan, PSAK 35: Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol	16 Juni 2009
69	PPSAK 2 Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan PSAK 43 Akuntansi Anjak Piutang	5 Desember 2009
70	PPSAK 3 Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Rekstrukturisasi Utang Piutang Bermasalah	22 Desember 2009
71	PPSAK 4 Pencabutan PSAK 31: Akuntansi Perbankan, PSAK 42:Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Perusahaan Reksa Dana	15 Desember 2009
72	PPSAK 5 Pencabutan ISAK 6: Interpretasi atas paragraf 12 dan 16 PSAK 55 (1999) tentang	15 Desember 2009

	Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak Dalam Mata Uang Asing	
73	PPSAK 6 Pencabutan PSAK 21: Akuntansi Ekuitas, ISAK 1: Penentuan Harga Pasar Dividen; ISAK 2: Penyajian Modal dalam Neraca dan Piutang kepada Pemesan Saham, dan ISAK 3: Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan	1 Februari 2011
74	PPSAK 7 Pencabutan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat	11 Agustus 2011
75	PPSAK 8 Pencabutan PSAK 27:Akuntansi Perkoperasian	8 April 2011
76	PPSAK 9 Pencabutan ISAK 5: Interpretasi atas Paragraf 14 PSAK 50 (1998) Tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	20 Desember 2011
77	PPSAK 10 Pencabutan PSAK 51: Akuntansi Kuasi Reorganisasi	20 Desember 2011
78	PPSAK 11 Pencabutan PSAK 39: Akuntansi Kerja Sama Operasi	28 Juni 2011
79	PPSAK 12 Pencabutan PSAK 33: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum	12 Juli 2013

2.1.3 Manfaat Konvergensi IFRS

Manfaat Konvergensi IFRS secara umum adalah:

a. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional (*enhance comparability).*

b. Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi.

c. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modalsecara global

d. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modalsecara global

e. Meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan antara lain, mengurangi kesempatan untuk melakukan earning management

Menurut Dewan Standar Akuntnasi Keuangan (DSAK), tingkat pengadopsian IFRS dibedakan menjadi lima tingkat yaitu

1. Full Adoption adalah suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan menerjemahkan IFRS sama persis dengan Bahasa yang digunakan negara pengadopsi.
2. Adopted adalah program konvergensi PSAK ke IFRS telah dicanangkan IAI pada Desember 2008. Adopted maksudnya mengadopsi IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut.

3. Piecemeal adalah suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan memilih paragraph tertentu saja.
4. Referenced (*convergence)* adalah sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan Bahasa dan paragrap yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar.
5. No Adepted at all adalah suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS

Adopsi penuh IFRS diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang terdiri atas Manajemen laba dan relevansi nilai. Dengan adopsi penuh IFRS, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS.

2.1.4 Kendala Adopsi Penuh IFRS Di Indonesia

Ada 3 kendala dalam mengadopsi penuh IFRS :

1. Kurang siapnya infrastuktur seperti DSAK sebagai Financial Accounting Standart Setter. DSAK adalah perumus SAK yang ada di Indonesia. Pada prakteknya DSAK mendapatkan berbagai macam kritik. Diantaranya adalah minimnya partisipasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam setiap *exposure draft hearing* PSAK yang baru akan diberlakukan. Padahal untuk dapat di *"cap*" kualitas *generally accepted accounting principle /* GAAP adalah harus melewati tahapan-tahapan yang diantaranya melibatkan seluruh *stakeholeder* yang terlibat. Selain itu status ketua dan anggota DSAK yang tidak bekerja *full time* membuat DSAK dipandang kurang begitu loyal dan independen. Dan yang memprihatinkan

adalah belum ada satu peraturan pun yang memberikan mandate bagi DSAK untuk mengeluarkan SAK.

2. Kondisi perundangan - undangan yang belum tentu sinkron dengan IFRS.

   Regulasi yang berkaitan dengan standar akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia tidak begitu jelas. Terdapat banyak perundang-undangan yang kurang mendukung terhadap standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Di dalam IAS 16, standar internasional memperbolehkan pengukuran aktiva tetap memakai *revaluation model* (ditahun berikutnya setelah aktiva di nilai berdasarkan nilai perolehannya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat menerapkan *revalution model* (*fair value accounting*) dalam pencatatan PPE (Property, Plan, and Equipment) mulai tahun 2008 (asumsi bahwa PSAK 16 akan mulai efektif tahun 2008). Hal ini adalah perubahan yang cukup besar karena selama ini *revalution model* belum dapat diterapkan di Indonesia dan hanya bisa dilakukan jika ketentuan pemerintah mengijinkan. *Revaluation model* memperbolehkan PPE dicatat berdasarkan nilai wajarnya. Permasalahannya di Indonesia adalah sistem perpajakan yang tidak mendukung standar ini. Di dalam peraturan perpajakan, revaluasi aset ke atas dikenai pajak final sebesar 10% dan harus dibayar pada tahun tersebut (tidak boleh dicicil dalam 5 tahun misalnya) dan tidak menghasilkan hutang pajak tangguhan yang bisa dibalik di tahun berikutnya bila nilai aktiva turun. Bayangkan apabila perusahaan memutuskan memakai *revalution model* dan setiap tahun harga asetnya meningkat, maka setiap tahun harus membayar pajak final.

Padahal kenaikan harga aset tersebut tidaklah membawa aliran kas masuk ke dalam perusahaan. Bila aturan perpajakan tidak mendukung, maka dapat dipastikan perusahaan akan enggan menerapkan *revaluation model*. Bukan hanya sistem pajaknya saja yang memberatkan, bila perusahaan memakai*revaluation model*, maka siap-siap untuk keluar uang lebih banyak untuk menyewa jasa penilai. Hal ini dikarenakan banyaknya aset tetap yang btidak memiliki nilai pasar sehingga ketergantungan kepada jasa penilai (*assessor*) akan besar untuk menilai aset-aset ini.

3. Kurang siapnya SDM dan dunia pendidikan di Indonesia

   IFRS hanyalah alat untuk mencapai kemudahan dalam berinvestasi. Yang akan menggunakan dan mengoptimalkan alat tersebut tidak lain tidak bukan hanyalah manusia itu sendiri meskipun akan sedikit di bantu dengan teknologi informasi. SDM di Indonesia haruslah dapat memahami dengan baik apa itu IFRS. Tentunya SDM-SDM yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan baik praktisi, pemerintah, hingga akademisi. Salah satu kelemahan SDM Indonesia adalah kesulitan dalam menerjemahkan IFRS. Jadi dalam menerjemahkan dan memahami IFRS membutuhkan waktu yang tidak singkat. Padahal perubahan-perubahan di IFRS adalah sangat cepat, sehingga saat IFRS yang sudah selesai diterjemahkan terkadang IFRS yang tidak lagi berlaku. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Negara lain yang langsung mengambil teks asli IFRS tanpa menerjemahkannya terlebih dahulu

2.1.5 Manajemen Laba

Manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan untuk jangka panjang. Dengan demikian, manajemen laba dapat diartikan sebagai suatu tindakan manajemen dalam mempengaruhi laba yang dilaporkan dan memberikan manfaat ekonomi yang keliru kepada perusahaan, sehingga dalam jangka panjang hal tersebut akan sangat mengganggu bahkan membahayakan perusahaan. Icih, Fikrotusshohah (2014) menyatakan manajemen laba adalah deteksi atas kemungkinan dilakukannya manipulasi data. Dalam laporan keuangan diteliti melalui penggunaan akrual. Jumlah akrual yang tercermin dalam perhitungan laba terdiri dari *discreationary dan nondiscreationary*. Transaksi *nondiscreationary* adalah transaksi yang dicatat menggunakan satu prosedur dan apabila prosedur tersebut dipilih maka manajemen diharapkan konsisten dalam menggunakan prosedur tersebut. Transaksi discreationary memberikan kebebasan kepada manajemen menentukan jumlah transaksi akrual secara fleksibel.

Tujuan manajemen laba adalah memanipulasi besaran laba yang dilaporkan kepada para pemegang saham dan mempengaruhi hasil perjanjian yang bergantung pada angka angka akuntansi yang dilaporkan. Ada tiga sasaran yang dapat dicapai oleh manajer dalam melakukan manajemen laba yaitu minimalisasi biaya politik,

maksimalisasi kesejahteraan manager, dan minimalisasi kas pendanaan. Faktor faktor yang menyebabkan munculnya manajemen laba :

1. Manajemen akrual. Faktor ini biasanya berkaitan dengan semua aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang secara pribadi yang merupakan wewemang dari manajer.
2. Penerapan suatu kebijakan akuntansi yang wajib. Faktor ini berkaitan dengan keputusan manajer untuk menenerapkan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan yaitu antara menerapkan awal dari waktu yang ditetapkan atau menunda sampai waktu berlakunya kebijaksanaan tersebut
3. Perubahan aktiva secara sukarela.faktor yang berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau merubah suatu metode akuntansi tertentu diantara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada.

2.1.5 Relevansi Nilai Informasi Akuntansi

Telah disebutkan bahwa salah satu tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk menaksir nilai perusahaan. Beberapa penelitian empiris akuntansi telah berhasil menemukan relevansi nilai informasi akuntansi dalam rangka meningkatkan analisis laporan keuangan. Relevansi nilai bermanfaat untuk menginvestigasi hubungan empiris antar nilai nilai pasar saham dengan informasi akuntansi yang dimaksudkan untuk menilai pengaruh angka angka akuntansi tersebut dalam penilaian

pundamental perusahan. (Saraswati, 2012) mengungkapkan bahwa terdapat empat pendekatan dalam memahami relevansi nilai informasi akuntansi yaitu :

1. Pendekatan analisis Fundamental, bahwa informasi akuntansi menyebabkan perubahan harga pasar dan mendeteksi terjadinya penyimpangan harga saham
2. Pendekatan prediksi, bahwa informasi akuntansi dikatakan relevan apabila bermanfaat untuk memprediksi prosfek kinerja perusahaan dimasa akan datang.
3. Pendekatan perwujudan informasi nilai relevansi, bahwa informasi akuntansi dikatakan relevan apabila digunakan investor untuk menetapkan harga saham dengan satu syarat informasi diukur berdasarkan reaksi pasar.
4. Pendekatan pengukuran relevansi nilai, bahwa relevansi nilai informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan diukur oleh kemampuannya untuk menangkap informasi bisnis dan aktivitas lainnya.

Relevansi nilai dapat diartikan sebagai kemampuan informasi akuntansi untuk menjelaskan nilai perusahaan. Terdapat dua tipe model penilaian yang dapat digunakan untuk menginvestigasi hubungan tersebut yaitu model harga dan model return. Model harga menguji hubungan harga saham dengan nilai buku dan *earning*, sedangkan model return menguji hubungan return saham dengan earning dan perubahan earning. Relevansi mencerminkan seberapa baik akuntansi memberikan informasi yang diperlukan investor.

Konsisten dengan penelitian IFRS sebelumnya (misalnya,Suprihatin & Tresnaningsih, 2013), kualitas informasi akuntansi dalam penelitian ini di proksikan dengan relevansi nilai. Dalam penelitiannya menyatakan perusahaan dengan kualitas informasi akuntansi yang tinggi mempunyai nilai relevansi nilai laba bersih dan nilai buku ekuitas yang tinggi. Relevansi nilai informasi akuntansi sebagai kemampuan angka angka akuntansi untk merevew informasi yang mendasari arga saham, sehingga relevansi nilai diindikasikan dengan sebuah hubungan statistical antara informasi keuangan dan harga atau return saham. Kualitas informasi akuntansi yang tinggi diindikasikan dengan adanya hubungan yang kuat antara harga/return saham dan laba serta nilai buku ekuitas karena kedua informasi akuntansi tersebut mencerminkan kondisi economic perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingg penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdhulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

no	Judul Penelitian /Peneliti / Tahun	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1	Telaah Kualitas Informasi laporan keuangan dan asimetri informasi sebelum dan setelah adopsi IFRS / edvandini, subroto, saraswati / 2014	Variabel dependen : kualitas laporan keuangan, variabel independen asimetri lapran keuangan sebelum adopsi IFRS dan sesudah adopsi IFRS	Pengujian kualitas informasi akuntansi menggunakan *price model* dan *return model* semakin meningkat setelah adopsi IFRS dibandingkan sebelum adanya adopsi IFRS, pengujian simetri setelah adopsi IFRS menunjukan penurunan
2	Analisis kualitas informasi akuntansi sebelum dan sesudah adopsi IFRS / Icih,fikrotusshohah / 2014	Variabel dependen : kualitas informasi akuntansi, Variabel independen : sebelum dan sesudah adopsi IFRS	Terdapat perbedaan tingkat manajemen laba sebelum dan sesudah adopsi IFRS, terdapat perbedaan tingkat relevansi buku sebelum sesudah adopsi IFRS,

			terdapat perbedaan tingkat relevansi buku sebelum dan sesudah adopsi IFRS.
3	Kualitas informasi akuntansi pra dan pasca adopsi IFRS / rahmawati, martini / 2015	Variabel dependen : kualitas informasi akuntansi, Variabel independen : sebelum dan sesudah adopsi IFRS	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kualitas informasi akuntansi pra dan pasca adopsi IFRS baik dari sisi manajemen laba dan relevansi nilai.
4	Perbedaan kualitas informasi akuntansi sebelum dan sesudah pengadopsian penuh IFRS / Sevilla, Nugrahanti / 2014	Variabel manajemen laba , relevansi nilai	Terdapat perbedaan tingkat manajemen laba pada periode sebelum dan sesudah adopsi IFRS, terdapat peningkatan relevansi nilai setelah pengadopsian IFRS
5	Adopsi IFRS dan relevansi	Variabel pengujian :	Tidak terdapat

	nilai informasi akuntansi / Cahyonowati, Ratmono / 2012	relevansi nilai	peningkatan relevansi nilai informasi akuntansi secara keseluruhan setelah adopsi IFRS, hanya peningkatan terjadi untuk informasi laba bersih.

2.3 Kerangka Pemikiran

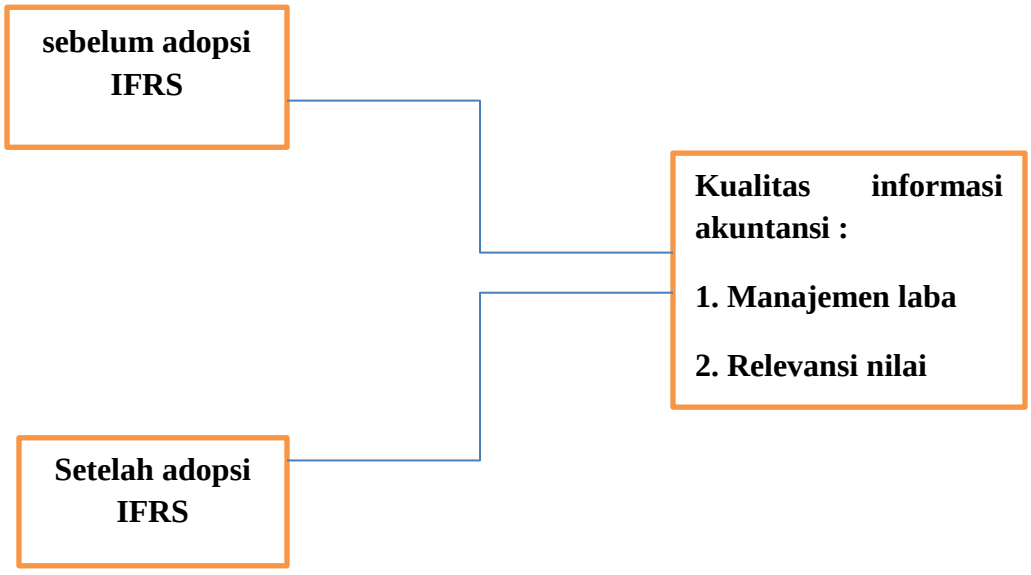

Gambar 1. 1 kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

Perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, Karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis juga juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belim jawaban yang empirik. Secara statistic, hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penilitian ((Kuswanto, 2012).

Semula, istilah hipotesis berasal dari bahasa yunani yang mempunyai dua kata yaitu kata *hufo* (sementara) dan *theis* (pernyataan atau teori). Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja (hipotesis alternatif Ha atau h1 yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan teori teori yang menyatakan ada hubungannya dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan tentang keadaan popolasi yang akan diuji kebenaran berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Dengan demikian dalam perhitungan statistik yang diuji adalah hipotesis non (Ho), jadi hipotesis nol adalah pernyataan tidak ada

hubungan, pengaruh atau perbedaan antara parameter dengan statistik. Hipotesis o dirumuskan dengan kalimat negative.

Berdasarkan uraian datas maka dalam penelitian ini penulis menyumoulkan bahwa hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimana yang menyatakan adanya perbedaan :

H1: Terdapat perbedaan kualitas informasi akuntansi yang diukur dari Manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) *Convergensi* IFRS

H2: Terdapat perbedaan kualitas informasi akuntansi yang diukur dari Relevansi nilai sebelum dan sesudah penerapan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) *Convergensi* IFRS